

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan pencarian penelitian dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Daur Ulang (Upcycling) Barang Bekas (Studi Terhadap Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Talang Bubuk)* belum ditemukan penelitiannya, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dan dianggap sesuai dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam skripsi Nikmal Perdana yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Oleh Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung*¹ yang menjadi fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan melalui kegiatan daur ulang sampah yang dilakukan di Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung serta manfaatnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sama, yaitu penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui kegiatan daur ulang sampah di Kelurahan Lenteng Agung, memberikan manfaat bagi masyarakat setempat khususnya kaum perempuan. Manfaat yang ditimbulkan yaitu meminimalisir peredaran sampah, meningkatkan penghasilan nasabah yang

¹ Nikmal Perdana, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Oleh Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung*, "Skripsi" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

mengikuti kegiatan ini, dan juga sosialisasi lebih aktif antar masyarakat, serta meminimalisir banjir yang kerap terjadi di lokasi ini.

Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, yang membedakan adalah fokus penelitian dan juga lokasi penelitiannya. Nikmal Perdana membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang di bank sampah Berlian di Kelurahan Kelenteng Agung sedangkan peneliti membahas tentang pengembangan masyarakat melalui kegiatan daur ulang (*upcycling*) barang bekas di Lorong Mari Kelurahan Talang Bubuk.

Kemudian, skripsi Nurul Purbasari yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah Poklili Perumahan Griya Limbah Depok Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*.² Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Recycle* atau mendaur ulang yaitu memilah-milah sampah, menimbang, dan merubah sampah menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Persamaan dari penelitian ini yaitu metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan yang membedakan terdapat pada fokus penelitian, permasalahan penelitian, dan juga lokasi penelitian.

Selanjutnya, skripsi Yan Kurniawan yang berjudul *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Malang (BSM) Kota Malang dengan Menggunakan Pendekatan Partisipasi Emansipatoris*.³

² Nurul Purbasari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah Poklili Perumahan Griya Limbah Depok Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*, "Skripsi" (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014).

³ Yan Kurniawan, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Malang (BSM) Kota Malang dengan Menggunakan Pendekatan Partisipasi Emansipatoris*, "Skripsi" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan bank sampah di Kota Malang dengan menggunakan pendekatan partisipasi emansipatoris dan bagaimana dampak pengelolaan bank sampah di Kota Malang terhadap masyarakat. Secara jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian sosial yang bersifat deskriptif-analitik. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengenai konsep pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Bank Sampah Malang (BSM) Kota Malang yang terbagi ke dalam tiga aspek, dan juga pemberdayaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat di BSM di Kota Malang yang terdiri atas lima proses.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu juga sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan yang membedakan adalah disini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipasi emansipatoris. Sedangkan peneliti membahas tentang pengembangan masyarakat melalui kegiatan daur ulang (*upcycling*) sampah.

B. Landasan Teori

1. Pengembangan Masyarakat

1.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat atau yang disebut juga dengan *community development* merupakan suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara tersusun (sistematis), terencana dan juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat yang

mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Menurut Rudito, secara hakekatnya *community development* diartikan sebagai proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat, dan daerah terhadap kehidupan komuniti lokal.⁴

Pengembangan masyarakat memiliki arti sebagai upaya untuk mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat yang secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial yang saling menghargai. Pengembangan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan ataupun sarana yang dibutuhkan masyarakat, serta mendidik juga membuat masyarakat berdaya dan mampu dalam mengerjakan sesuatu. Pengembangan masyarakat diartikan juga sebagai komitmen yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat kalangan bawah sehingga masyarakat tersebut mempunyai pilihan yang nyata tentang masa depan yang akan mereka jalani.⁵

Pengembangan masyarakat adalah usaha untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan semua kemampuan yang dimiliki dengan lebih baik, yang bisa berupa alam dan juga tenaga. Pengembangan masyarakat juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bisa menggali inisiatif dalam melakukan kegiatan yang bersifat investasi guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik lagi.

⁴ Akmaruzzaman, Sumardjo, & Himawan Hariyoga, *Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah*, Jurnal Manajemen Pembangunan Dakwah Vol. 5 No.1, 2013, hlm. 50

⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.

Fokus dalam pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menolong masyarakat yang mempunyai kesamaan minat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan kegiatan tersebut secara bersama. Pengembangan atau yang bisa disebut juga sebagai pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara bersama dan terstruktur (terencana) yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang-bidang yang biasanya termasuk ke dalam pembangunan yaitu sektor ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan juga pendidikan.⁶

Tujuan dari program pengembangan masyarakat (*community development*) adalah pemberdayaan masyarakat, bagaimana anggota masyarakat tersebut dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan pihak perusahaan maupun pemerintah.⁷

Berdasarkan hal tersebut, program pengembangan masyarakat harus berdasarkan pada suatu asumsi, nilai-nilai, dan juga prinsip-prinsip supaya dapat memberdayakan masyarakat secara insiatif dan dengan kemampuan serta partisipasi mereka sendiri. Karena hal itu, partisipasi memainkan peran yang sangat penting dalam program pengembangan masyarakat, sebagaimana berhasilnya program pengembangan di berbagai negara.

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 39

⁷ Akmaruzzaman, Sumardjo, & Himawan Hariyoga, *Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah*, Jurnal Manajemen Pembangunan Dakwah Vol. 5 No.1, 2013, hlm. 51

Partisipasi tersebut akan terwujud dengan syarat bahwa masyarakat secara sukarela dapat berpartisipasi apabila masyarakat itu diberikan kebebasan dalam berpartisipasi.

1.2 Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip pengembangan masyarakat secara garis besarnya ada 4 yaitu : Yang pertama, pengembangan masyarakat itu memihak pada sebuah kepentingan. Pengembangan masyarakat tidak bebas akan nilai, ataupun interpretasi objektif atas masyarakat. Oleh karena itulah semua tindakan yang bersifat pribadi, praksis atau intelektual dibimbing oleh suatu nilai- nilai dan juga kepentingan. Dalam hal ini pengembangan masyarakat bertujuan untuk menampakkan nilai dan menggunakan kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau secara jelas.⁸

Prinsip yang kedua, yaitu mengubah masyarakat dan membuatnya terlibat dalam konflik yang bertujuan untuk mengubah suatu sktruktur yang bersifat diskriminatif, memaksa ataupun menindas masyarakat. Melalui konflik mereka sering kali bergerak menjadi suatu struktur juga relasi sosial yang berbeda-beda.

Prinsip yang ketiga, bahwa pengembangan masyarakat itu ialah membebaskan masyarakat, memberi peluang untuk membuka masyarakat, dan juga menciptakan suatu demokrasi partisipatori. Yang dimaksud dengan pembebasan yaitu melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa. Para aktivis

⁸ Zubaedi, *Op Cit.* hlm. 37

pengembangan masyarakat adalah fasilitator bukan seorang pemimpin, ahli atau penghasut dalam proses pembebasan masyarakat.

Terakhir prinsip yang keempat, yaitu memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengakses program-program kemasyarakatan. Program tersebut ditempatkan pada lokasi yang bisa diakses oleh masyarakat dan diharapkan juga bisa memberikan integrasi dan koordinasi secara langsung kepada masyarakat.⁹

Dalam buku *Pengembangan Masyarakat*, Zubaedi menjelaskan ada 22 prinsip dalam pengembangan masyarakat yang saling berkaitan dan juga melengkapi antara satu dan lainnya.¹⁰ Prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah:

1) Pembangunan Menyeluruh

Ada beberapa aspek penting yang tercermin dari kehidupan masyarakat yaitu aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, dan juga personal atau spiritual. Keenam aspek tersebut harus diperhatikan dalam program pengembangan masyarakat agar terjadinya proses pembangunan yang lengkap.

2) Melawan Kesenjangan Struktural

Dalam pengembangan masyarakat, yang harus dicermati oleh aktivis sosial adalah kemungkinan adanya praktik-praktik penindasan yang mungkin terjadi di dalam suatu institusi media, struktur organisasi,

⁹ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 41-52

sistem sosial ekonomi, dan juga pasar atau iklan. Selain itu, perlu juga mencermati adanya penindasan yang disebabkan oleh umur, gender ataupun ketidakmampuan fisik. Dan untuk memfokuskan program pengembangan masyarakat, maka perlu adanya penanganan untuk mencegah penindasan tersebut.

3) Hak Asasi Manusia (HAM)

Program pengembangan masyarakat harus bisa memperhatikan dan juga menjunjung tinggi penghargaan suatu hak asasi manusia (HAM), baik itu dalam segi negatif ataupun positif. Dalam pandangan negatif, hak asasi manusia menjadi suatu hal yang penting bagi pengembangan masyarakat dikarenakan setiap program pengembangan masyarakat itu harus selaras dengan prinsip-prinsip yang menjadi asasi dasar umat manusia. Dan dalam pandangan yang positif, para aktivis pengembangan masyarakat menjadikan Deklarasi Universal dan Hak Asasi Manusia sebagai tujuan dari pengembangan masyarakat.

4) Berkelanjutan

Setiap program pengembangan masyarakat harus bisa berjalan dalam rangka yang berkelanjutan agar bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dengan kerangka yang berkelanjutan, diharapkan dapat membangun sebuah struktur organisasi, dan juga bisnis ataupun industri yang tumbuh dan berkembang ke dalam berbagai macam tantangan. Dan jika program tersebut berjalan secara berkelanjutan, maka diyakini akan

membawa masyarakat tersebut dalam keadaan yang menjadi kuat, harmonis serta perhatian terhadap keselamatan suatu lingkungan.¹¹

5) Pemberdayaan

Menurut Zubaedi pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Strategi yang digunakan dalam hal ini pun menuntut untuk memahami kemampuan masyarakat, memperhatikan, dan memecahkan segala hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Hambatan atau kendala yang dimaksudkan dapat berupa suatu struktur yang menindas kelas, ras/etnis, bahasa, juga pendidikan dan mobilitas pribadi serta struktur kekuasaan yang didominasi oleh para elite.¹²

6) Personal dan Politik

Setiap isu, perasaan ataupun tindakan yang bersifat pribadi dapat menjadi bagian yang terlibat dalam politik. Hubungan antara kepentingan pribadi dan politik merupakan hubungan yang bisa saja disebabkan oleh adanya program pengembangan masyarakat. Karena hal itu dapat mempengaruhi tingkat kesadaran, pemberdayaan, dan juga pengembangan program yang bertindak untuk memecahkan suatu masalah.

7) Kepemilikan Masyarakat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42

¹² *Ibid.*, hlm. 43

Kepemilikan yang dimaksudkan dapat berupa barang material seperti barang-barang yang bisa didagangkan (komoditas), tanah, serta bangunan dan lain sebagainya. Kemudian kepemilikan struktur dan proses juga dimaksudkan dalam hal ini. Seperti adanya kontrol terhadap masyarakat, pendidikan, juga pelayanan kesehatan, pengembangan kearifan lokal dan sebagainya.

8) Kemandirian

Pengembangan masyarakat mengupayakan agar masyarakat mampu dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya yang telah ada secara mandiri dan semaksimal mungkin. Sumber daya yang dimaksudkan bisa berupa keuangan, manusia, alam dan lain sebagainya. Kemandirian masyarakat secara total di era industri tidak akan dapat terwujud apabila tanpa kepercayaan diri. Kemandirian merupakan arah realistis yang perlu diwujudkan.¹³

9) Kebebasan dari Negara

Para pengembang masyarakat biasanya tak ada alternatif dalam pendanaan yang nyata, dan terkadang membutuhkan dorongan atau dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan prosesnya. Akan tetapi, secara umum akan menjadi lebih baik jika suatu masyarakat itu dapat bekerja tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. Karena jika adanya pendanaan dari pemerintah tersebut biasanya hanya akan melemahkan masyarakat, bukannya memperkuat.

¹³ *Ibid.*, hlm. 44

10) Tujuan Langsung dan Visi yang Besar

Pengembang masyarakat dituntut untuk dapat menjawab setiap tantangan tentang seberapa jauh mereka akan bisa menghubungkan tujuan langsung dan visi jangka panjang, ataupun bagaimana visi itu tidak hanya relevan dengan visi yang lainnya, tetapi menjadi bagian yang terpisahkan dari tujuan yang lain secara berkelanjutan.

11) Pembangunan Organik

Pembangunan organik dapat diartikan bahwa seseorang dapat menghormati ataupun menghargai sifat-sifat khusus dalam masyarakat, membiarkan, dan juga mendorong mereka agar bisa berkembang dengan kemampuan sendiri melalui suatu pemahaman tentang kompleksitas antara hubungan masyarakat dengan lingkungan.

12) Laju Pembangunan

Dalam pembangunan organik, masyarakat menentukan sendiri bagaimana proses jalannya pembangunan itu. Akan tetapi jika proses pembangunan itu dilakukan secara terburu-buru maka akan menimbulkan kompromi yang fatal, bisa saja karena hal tersebut masyarakat kehilangan rasa memiliki dalam proses itu dan juga kehilangan komitmen agar bisa terlibat dalam suatu proses pembangunan.¹⁴

13) Kepakaran Eksternal

Prinsip utama dalam pembangunan yaitu masyarakat tidak harus selalu percaya dengan adanya struktur atau solusi dari pihak luar

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 46

walaupun itu telah dianggap baik. Namun, bukan berarti pula proses pembangunan masyarakat itu tidak bisa mengambil keuntungan dari pihak luar, tetapi keahlian dari pihak luar itu akan lebih menguntungkan jika telah diteliti dahulu apakah akan cocok dengan situasi lokal yang sedang dikembangkan.

14) Pembentukan Masyarakat

Upaya yang dihasilkan dari pembentukan masyarakat ini yaitu adanya keterlibatan untuk menguatkan interaksi sosial di dalam masyarakat, membantu, dan membangun kebersamaan diantara mereka agar bisa saling berkomunikasi menciptakan rangkaian dialog yang saling memahami hingga mewujudkan adanya suatu tindakan sosial.¹⁵

15) Proses dan Hasil

Pendekatan Gandhi menekankan bahwa proses adalah hal yang penting dalam penentuan hasil. Proses yang dilalui dengan kekerasan atau tidak berprinsip akan menimbulkan rusaknya suatu tujuan. Etika dan juga moral menjadi persoalan yang penting dalam suatu proses. Karena itu, proses haruslah mencerminkan sebuah tujuan, sebagaimana hasil yang akan mencerminkan sebuah proses itu.

16) Integritas Proses

Dalam kegiatan pengembangan masyarakat, proses yang digunakan pada kegiatan tersebut sama pentingnya dengan hasil yang hendak dicapai. Oleh karena itu, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 46

tersebut juga harus menyesuaikan dengan pengharapan dari hasil yang berkenaan dengan isu kesinambungan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Proses pekerjaan masyarakat selalu membutuhkan penelitian secara lebih dekat untuk menjamin bahwa integritas proses tetap terpelihara. Mereka diperlukan menjadi subjek yang menekankan prinsip keadilan sosial dan juga lingkungan.

17) Tanpa Kekerasan

Dalam membangun sebuah masyarakat, sangat diperlukan adanya proses yang tanpa adanya tindak kekerasan sebagaimana yang sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian. Kekerasan yang dimaksud juga bukan dari fisik saja, juga dikarenakan adanya tekanan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses harus diusahakan untuk memperkuat bukan menyerang, memasukkan bukan mengesampingkan, bekerja di dalam bukan bekerja menentang, serta memediasi bukan berkonfrontasi.

18) *Inclusiveness* (Keterbukaan)

Keterbukaan adalah salah satu prinsip penting dalam perspektif non-kekerasan (perdamaian). Prinsip keterbukaan yang diterapkan kedalam pengembangan masyarakat memerlukan suatu proses yang selalu merangkul bukannya menyisihkan, semua orang yang terlibat harus dihargai secara intrinsik walaupun mereka mempunyai pandangan yang berlawanan dan setiap orang tersebut juga harus diberi ruang untuk

mengubah posisinya dalam sebuah isu tanpa kehilangan muka.¹⁶

19) Konsensus

Pendekatan konsensus bekerja dalam mencapai kesepakatan dan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah solusi yang didukung oleh seluruh anggota masyarakat. Secara hakiki, konsensus berarti menangani sebuah isu, seberapa pun waktu dibutuhkan, sampai hasil yang diperoleh memuaskan setiap orang.

20) Kooperatif

Pengembangan masyarakat yang bertujuan membangun struktur dan proses alternatif yang didasarkan pada suatu kerja sama bukan konflik. Dan pada tingkat yang paling dasar, pengembangan masyarakat akan berupaya untuk membawa kerja sama dalam berbagai kegiatan masyarakat, dengan membawa masyarakat tersebut bergabung dan menemukan cara-cara untuk menghargai kerja sama dalam individu maupun kelompok.

21) Partisipasi

Di dalam suatu pembangunan, masyarakat itu harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi dengan tujuan agar masyarakat tersebut bisa terlibat aktif dalam setiap proses dan juga kegiatan pengembangan masyarakat. Lebih banyak anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif, maka akan lebih banyak juga cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan dapat direalisasikan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49

Namun hal ini tidak menekankan bahwa setiap orang yang ikut berpartisipasi tersebut juga harus berpartisipasi dengan cara yang sama, karena masyarakat itu memiliki keterampilan, keinginan, dan juga kemampuan yang berbeda-beda.¹⁷

22) Menentukan Kebutuhan

Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai bantuan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan kemudian bertindak sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Jika dipandang dari perspektif keadilan sosial dan ekologis, maka masyarakat sendirilah yang harus memiliki dan mengontrol proses pengukuran dan penentuan kebutuhan. Seorang pekerja sosial dalam konteks ini, perlu berpikir tentang hubungan erat antara struktur dengan proses, bukan berpikir tentang hubungan erat antara struktur dan juga proses. Oleh sebab itu, pengembangan masyarakat membutuhkan orang-orang yang selalu memikirkan koneksi (hubungan).

1.3 Manajemen Pengembangan Masyarakat

Secara umum, pengembangan masyarakat dapat diaktualisasikan dalam beberapa tahap manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian atau juga pengembangan berbagai langkah dalam penanganan suatu program kemasyarakatan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 83

a) Perencanaan

Dalam manajemen yang dimaksudkan dengan perencanaan adalah proses untuk mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan termasuk ke dalam proses yang paling penting dari semua fungsi manajemen, karena jika tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain seperti dalam pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengontrolan itu tak akan bisa berjalan dengan baik. Dan dalam konteks pengembangan masyarakat bahwa perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan sosial. Yang mana perencanaan sosial pada hakekatnya menunjukkan pada perencanaan mengenai program-program pelayanan kesejahteraan sosial.¹⁹

b) Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Menurut James A.F. Stoner bahwa yang dimaksudkan dengan koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuan yang secara efektif dan juga efisien.

Kegiatan pengembangan masyarakat biasanya melibatkan banyak orang dan juga kelompok. Pelibatan individu, kelompok, juga masyarakat dapat berjalan efisien dan efektif apabila dilakukan koordinasi yang baik pula.

Koordinasi di dalam pengembangan masyarakat meliputi perorangan atau

¹⁹ Muhtadi & Tatan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 41-42

individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.²⁰

c) Penanganan Program Kemasyarakatan

Kebanyakan dari aktivis (pekerja) sosial menyusun berbagai kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa tahap perencanaan program. Dan tahapan tersebut meliputi: pertama, yaitu tahap *problem posing* atau bisa disebut pemaparan masalah. Tahap ini dilakukan oleh aktivis dengan cara mengelompokkan dan juga menentukan masalah-masalah ataupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran.

Tahap kedua yaitu *problem analysis* atau tahap analisis masalah. Pada tahap ini dilakukan cara pengumpulan informasi yang dimulai dari jenis, dan juga ukuran ataupun ruang lingkup dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga informasi tersebut dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu tahap penentuan tujuan dan juga tahap sasaran. Tahap tujuan dapat terbagi atas visi, tujuan dalam jangka panjang, dan juga pernyataan mengenai petunjuk umum. Sedangkan tahap sasaran menunjuk pada setiap kegiatan yang dapat dianalisis, dan juga diidentifikasi ataupun yang dapat diungkapkan secara jelas kepada masyarakat.

Tahap yang keempat yaitu *action plans* atau perencanaan tindakan. Yang mana dalam tahap ini pekerja sosial dapat melaksanakan kegiatan perencanaan sebagai aksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, yaitu

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29 & 31

tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap langkah-langkah dalam pengembangan masyarakat sekaligus memperhitungkan apa saja konsekuensi yang didapat dari aksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi (penilaian) secara terus-menerus dalam segi formal ataupun semi formal pada proses pengembangan dan juga secara informal dalam tiap hari, minggu, maupun bulan.²¹

1.4 Model Pengembangan Masyarakat

Pendekatan yang biasa dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LSM dalam kegiatan pengembangan masyarakat ada 3 yaitu:

Pertama, *the welfare approach*. Pada pendekatan ini pelaksanaannya dengan cara memberi bantuan kepada suatu kelompok tertentu, misalnya yang terkena musibah. Pelayanan yang diberikan dapat berupa makanan, kesehatan, ataupun pendidikan kepada mereka yang membutuhkan.

Kedua, *the development approach*. Pendekatan ini berpusat pada suatu proyek pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan, dan juga kemandirian serta keswadayaan suatu masyarakat.

Selanjutnya, yang ketiga yaitu *the empowerment approach*. Pendekatan ini melihat suatu kemiskinan sebagai akibat proses dari politik yang berusaha memberdayakan ataupun melatih masyarakat untuk dapat mengatasi ketidakberdayaannya.²²

²¹ Zubaedi, *Op Cit.* hlm. 83

²² *Ibid.*, hlm. 120

Konsepsi Pengembangan Masyarakat terdiri atas 3 model, yaitu :

a. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal yang dimaksudkan adalah suatu proses yang ditujukan guna mewujudkan kemajuan sosial dan juga ekonomi masyarakat melalui partisipasi secara aktif dan juga inisiatif dari anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah, melainkan mereka dianggap sebagai masyarakat yang memiliki potensi namun potensi tersebut sepenuhnya belum dikembangkan.

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan juga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pekerja sosial. Model pengembangan ini lebih mengorientasikan suatu tujuan proses daripada tujuan hasil. Melalui pengembangan kemampuan lokal dan juga peningkatan suatu strategi kemandirian atau informasi maupun komunikasi dan relasi dalam keterlibatan masyarakat menjadi inti pada proses pengembangan masyarakat yang bernuansa *bottom-up* (dari bawah ke atas).

b. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial menunjuk pada suatu proses yang berguna untuk menentukan keputusan dan juga menetapkan tindakan pemecahan masalah sosial yang tertentu seperti kemiskinan, kenakalan remaja maupun pengangguran dan lain sebagainya. Perencanaan sosial ini berorientasi pada suatu tugas.

Masyarakat yang terlibat dalam suatu proses pembuatan kebijakan atau penentuan tujuan dan juga pemecahan masalah bukanlah merupakan prioritas dalam hal ini. Pengambilan keputusan adalah wewenang yang dilakukan oleh para aktivis sosial di lembaga formal pemerintahan misalnya Depsos (Departemen Sosial) ataupun swasta misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Yang menjadi perencana sosial dalam hal ini dipandang sebagai orang yang ahli dalam bidang penelitian, analisis masalah juga kebutuhan masyarakat. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi atau melaksanakan dan juga mengevaluasi setiap program yang menjadi layanan kemanusiaan.²³

c. Aksi Sosial

Perubahan yang bersifat fundamental terhadap kelembagaan ataupun struktur masyarakat merupakan tujuan sasaran utama dalam suatu aksi sosial yang dilalui dengan proses *distribution of power* (pendistribusian kekuasaan), *distribution of resources* (sumber), dan juga *distribution of decision making* (pengambilan keputusan). Dalam hal ini aksi sosial seringkali didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat merupakan sistem klien yang menjadi korban dari ketidakadilan suatu struktur. Aksi sosial yang dimaksudkan ini berorientasi pada proses dan hasil yang mengatur dan mengorganisir masyarakat melalui proses penyadaran, ataupun tindakan yang aktual guna mengubah suatu struktur kekuasaan agar bisa memenuhi prinsip dalam demokrasi, dan pemerataan ataupun

²³ Edi Suharto, *Op Cit.* hlm. 44

juga keadilan.²⁴

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Daur Ulang (*Upcycling*)

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan juga masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.²⁵

Secara lebih rinci Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.²⁶

Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45

²⁵ Totok Mardikanto, Poerwoto Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 28

²⁶ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 50-51

kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup (kesejahteraan) setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- 4) Terjaminnya keamanan;
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dapat: mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah *mindset* masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan itulah yang pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai dari pemerintah, anggota

legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa.²⁷

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Masyarakat Lorong Mari RT.02 RW.01 dalam hal ini diarahkan untuk menyadari potensi mereka dalam proses pengembangan masyarakat. Adapun proses pengembangan masyarakat yang diyakini dapat memberdayakan dan juga meningkatkan kesejahteraan kehidupannya yaitu melalui kegiatan daur ulang (*upcycling*) dari barang bekas sebagai salah satu upaya untuk menunjang perekonomian masyarakat.

2.2 Pengertian Daur Ulang (*Upcycling*)

Proses untuk mengolah kembali barang yang tak terpakai atau sampah itulah yang disebut dengan daur ulang. Pengolahan daur ulang sampah ini dimanfaatkan sehingga secara tidak langsung juga dapat melestarikan lingkungan.²⁸ Adapun manfaat dari pengolahan sampah yaitu:

- a. Adanya daur ulang, dapat mengurangi jumlah limbah (barang bekas) yang telah tertimbun dalam bentuk *landfill* (tempat pembuangan akhir).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52

²⁸ Soedarto, *Lingkungan dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2013), hlm. 151

- b. Dapat menghemat energi, maksudnya ialah dalam pembuatan suatu aluminium dari bahan baku aluminium daur ulang biasanya energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bahan baku auksit.
- c. Daur ulang dapat menghasilkan berbagai macam produk dengan nilai yang tinggi, dan daur ulang juga dapat memberikan peluang kerja untuk banyak orang.
- d. Adanya proses daur ulang yang telah menghemat energi sehingga juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui.

Namun dalam hal ini yang dimaksudkan dalam daur ulang adalah dengan menggunakan metode *Upcycling*. *Upcycling* atau yang juga dikenal sebagai *creative reuse* (penggunaan kembali secara kreatif) yang artinya usaha menggunakan kembali barang sebagai barang baru tanpa harus melalui proses penghancuran.²⁹

Kegiatan *upcycling* ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan tetapi juga terdapat beragam manfaat lainnya, seperti mengurangi volume limbah yang ada dan juga mengurangi produksi serta penggunaan bahan mentah untuk memproduksi lebih banyak lagi. Dengan mengurangi produksi dan penggunaan bahan mentah maka masyarakat dapat mengurangi terjadinya polusi air, udara, juga tanah ataupun efek rumah kaca. Dalam proses *upcycling* diperlukan adanya kemampuan untuk menghargai bahan dan juga mencari cara yang kreatif untuk mengubah barang yang ada tersebut sebisa

²⁹ Cherlita Christianti, Hartanto D, Merry Sylvia, *Perancangan Kampanye Sosial Pengolahan Limbah Tekstil Rumah Tangga yang Efisien dan Bertanggung Jawab*, Jurnal DKV Adiwarna Universitas Kristen Petra Vol.1 No.14, 2019, hlm. 3

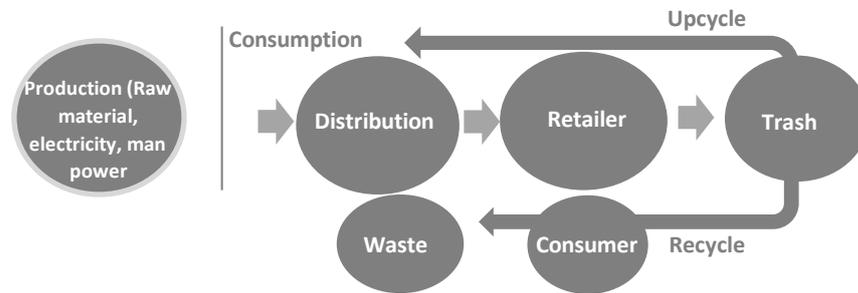
mungkin.

Upcycle adalah metode untuk menggunakan kembali barang yang telah dibuang agar bisa diubah menjadi suatu produk baru yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dengan nilai yang tinggi tersebut maka akan menghasilkan suatu desain yang menempatkan limbah kembali ke dalam posisi rantai produksi.³⁰

Upcycling adalah usaha untuk mengolah ataupun mengubah sampah menjadi suatu produk dengan nilai yang berkualitas lebih tinggi dari material asalnya. *Upcycling* dilakukan dengan tanpa membongkar, menguraikan atau bahkan diberi *treatment* yang khusus selama prosesnya. Metode ini juga dapat disebut dengan *Creative Upcycling* karena hanya membutuhkan kreativitas dari manusia selama proses transformasi itu berlangsung.

Jika dalam metode *Recycling* biasanya membutuhkan banyak energi dalam proses penghancuran materialnya, kemudian mengubahnya menjadi material dengan nilai yang lebih rendah maka berbeda dengan metode *Upcycling*. *Upcycling* adalah metode yang sangat hemat energi, dan memiliki kelebihan yang bisa di dapatkan seperti: (1) *Sustainable Design*; Desain berkelanjutan, (2) *Enviromental wise*; Lingkungan bijaksana, dan (3) *Creative approuch*; Pendekatan kreatif.

³⁰ Hana Hanifah, *Konsep Upcycle Sebagai Alternatif Solusi Pemanfaatan Limbah Kebaya Lama*, Jurnal Universitas Telkom Bandung Vol.5, No.3, 2018, hlm. 2



Gambar 2. Skema proses *upcycling*

Dalam skema tersebut, yang menjadi barang produksi telah didistribusi atau disalurkan kepada pengecer untuk diperjual belikan. Kemudian barang tersebut digunakan oleh konsumen, setelah tidak terpakai atau tidak berfungsi lagi maka akan menjadi sampah. Dan untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan proses *upcycling* tanpa menghancurkan benda/material. Setelah dilakukan *proses upcycling* maka akan menjadi produk yang lebih baru atau mungkin lebih baik dari sebelumnya yang hanya bermodalkan kreativitas dari manusia itu sendiri.³¹

³¹ William V.L, Yusita K, dan Filipus P.S, *Perancangan Produk Interior Kelas Premium Dengan Pengembangan Kreativitas Upcycling Kayu Bekas Peti Kemas*, Jurnal Intra Vol. 7 No. 2, 2019, hlm.157